

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain adalah dimaksudkan agar organisasi senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan atas pandangan tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik maka pemerintah daerah dapat mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi kegagalan dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah. Kemudian, isu strategis juga merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan maka menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis ini dirumuskan berdasarkan atas identifikasi pelbagai permasalahan yang sedang dialami oleh Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam pembahasan ini, hendak diuraikan pelbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Talaud, dan kemudian rumusan pelbagai isu strategis Kabupaten Kepulauan Talaud.

IV.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yang akandisajikan berikut ini merupakan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud yang relevan. Dengan demikian permasalahan pembangunan daerah disajikan dengan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Adapun permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Talaud pada setiap urusan pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Urusan Pendidikan

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang pendidikan adalah:

1. Komitmen politik pemerintah dalam membiayai pembangunan pendidikan belum didukung dengan kemampuan keuangan yang masih sangat terbatas dibanding dengan kebutuhan dasar pendidikan;
2. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah belum dapat memenuhi standar layanan pendidikan sebagai mana Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan yang diharapkan;
3. Tenaga pendidik/pengajar yang berkompentensi belum memenuhi kebutuhan pada sebagian besar sekolah;
4. Pelayan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah belum mampu memberikan pelayanan yang merata dan menjangkau semua lapisan masyarakat;
5. Perguruan Tinggi yang ada belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standard kebutuhan berdasarkan kompetensi bidang dan jurusan yang ada pada perguruan tinggi;
6. Perubahan Kurikulum menjadi pendekatan berbasis kompetensi berorientasi *Life skills*, menuntut kualitas manajemen dan kualitas tenaga pengajar yang memiliki kompetensi yang handal;
7. Sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang belum memadai dan mutu guru yang masih harus ditingkatkan;

8. Program mutu dan relevansi pendidikan belum optimal serta masih rendahnya persentase lulusan SMU yang memenuhi persyaratan untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi, serta masih terbatasnya lulusan SMK yang terserap dalam dunia kerja atau berwirausaha.

2. Urusan Kesehatan

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang kesehatan adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan masih rendah;
2. Pengembangan kemitraan dan kerjasama lintas sektor masih belum optimal;
3. Sarana dan prasarana kesehatan masih rendah;
4. Kualitas sumber daya manusia masih rendah mengingat tenaga kesehatan profesional masih minim;
5. Sistem informasi manajemen puskesmas (simpus) belum efektif;
6. Penguasaan IPTEK bagi tenaga kesehatan masih kurang sehingga komputerisasi belumlah dapat diterapkan pada setiap puskesmas.
7. Sarana bangunan rumah sakit yang belum lengkap;
8. Prasarana rumah sakit yang belum sepenuhnya lengkap;
9. Masih kurangnya ketersediaan tenaga rumah sakit;
10. Kurang peralatan medis;
11. Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum adalah:

1. Kegiatan Pekerjaan Umum dalam penyediaan aksesibilitas dan pelayanan pendidikan masih sangat jauh dan perlu perhatian khusus di Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. Belum optimalnya aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat;
3. Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, khususnya sarana dan prasarana transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara, sarana dan prasarana irigasi, sarana dan prasarana air bersih dan drainase;

4. Belum optimalnya pelayanan pemerintah dalam menghadapi rawan bencana serta kerusakan lingkungan.

4. Urusan Perumahan

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang perumahan adalah:

1. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan olahraga di daerah;
2. Sarana dan prasarana olahraga masih sangat terbatas;
3. Kurangnya alokasi anggaran untuk organisasi pemuda dan olahraga.

5. Urusan Penataan Ruang

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang penataan ruang adalah:

1. RTRW Kabupaten Kepulauan Talaud masih dalam proses legalisasi;
2. Belum tersedianya RDTR Kawasan;

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan adalah:

1. Kurangnya anggaran yang menyebabkan tidak terlaksananya sosialisasi beberapa dokumen perencanaan daerah kepada seluruh masyarakat Kepulauan Talaud;
2. Belum optimalnya pengalokasian anggaran pembangunan pada program dan kegiatan yang sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah;
3. Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan para pejabat dan staf perencana;

7. Urusan Perhubungan

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang perhubungan adalah:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung transportasi darat, laut dan udara;

2. Terbatasnya petugas lapangan.

8. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup adalah:

1. Lingkungan hidup berupa SDA yang menjadi bagian dari warisan generasi belum dijadikan sebagai warisan budaya secara merata di seluruh wilayah tetapi dialihkelola oleh pribadi manusia;
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat;
3. Belum adanya pengawasan yang perlu disepakati tentang pemanfaatan potensi SDA oleh pemerintah dan masyarakat;
4. Kesadaran masyarakat masih rendah;
5. Pembinaan pemerintah belum optimal.

9. Urusan Pertanahan

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang pertanahan adalah:

1. Masih adanya beberapa permasalahan dalam ganti rugi tanah;
2. Kurangnya perhatian pemerintah daerah tentang kelengkapan dokumen tanah karena kurangnya tersedianya dana untuk melengkapi dokumen tersebut;
3. Kurang tersedianya dana dalam APBD setiap tahun untuk membayar lokasi tanah yang dimiliki pemerintah daerah.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil adalah:

1. Keterbatasan Perangkat pelayanan SIAK;
2. Letak Geografis Kepulauan Talaud;

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah:

1. Peralatan dan perlengkapan kantor sesuai bidang spesifik dalam kelancaran tugas-tugas masih sangat terbatas dan belum memenuhi standarisasi yang dibutuhkan;
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengimplementasian peranan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah:

1. Tenaga penyuluh/pelayanan KB saat ini sangat kurang;
2. Kurangnya biaya operasional KB/kesejahteraan Keluarga;
3. Tenaga Penyuluh KB Masih Kurang.

13. Urusan Sosial dan Ketenagakerjaan

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang sosial dan ketenagakerjaan adalah:

1. Kualitas sumber daya manusia belum sesuai dengan kaulifikasi kebutuhan pasar kerja;
2. Kondisi lingkungan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja belum memadai;
3. Tenaga fungsional di bidang Ketenagakerjaan yang berpendidikan profesi terbatas/kurang;
4. Sarana dan prasarana kurang memadai;
5. Kesejahteraan pegawai relative kurang;
6. Terbatasnya dana operasional.

14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah adalah:

1. Lemahnya SDM koperasi;
2. Letak geografis yang sulit di jangkau;
3. Kurangnya jiwa kewirausahaan;
4. Kurang kemitraan;
5. Kurang teknologi informasi;
6. Belum adanya proteksi terhadap usaha koperasi/UKM;

7. Terbatasnya sarana dan prasarana;
8. Lemahnya kualitas SDM Aparatur;
9. Terbatasnya dana operasional/ Pembina.

15. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal adalah:

1. Kurangnya tenaga-tenaga yang terampil dalam bidang Penanaman Modal di Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. Kurangnya/minimnya sosialisasi dan koordinasi baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional;
3. Tidak adanya peraturan daerah (perda) yang menjadi dasar kebijakan dalam penentuan tentang penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Talaud;
4. Rendahnya koordinasi antara instansi teknis terkait;
5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada bidang penanaman modal masih kurang;
6. Masih rendahnya kesempatan mengikuti diklat bidang perijinan dan penanaman modal;
7. Kurangnya pendanaan.

16. Urusan Pariwisata dan Kebudayaan

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan adalah:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pariwisata Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. Pelaksanaan promosi pariwisata belum maksimal;
3. Belum tertatanya obyek wisata di Kabupaten Kepulauan Talaud.

17. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga adalah:

1. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan olahraga di daerah;
2. Sarana dan prasarana olahraga masih sangat terbatas;
3. Kurangnya alokasi anggaran untuk organisasi pemuda dan olahraga.

18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi dan berpolitik;
2. Tuntutan masyarakat beragam yang memerlukan penanganan secara profesional;
3. Terbatasnya sarana pendukung;
4. Terbatasnya tenaga yang terampil;
5. Masih rendahnya kesempatan mengikuti diklat teknis substantif.

19. Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah:

1. Belum semuanya mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya;
2. Penatausahaan Administrasi Keuangan di mana dalam pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun hingga saat ini masih berada dalam kategori *disclaimer*. Hal ini disebabkan karena penataan terhadap Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud belum optimal;
3. APBD yang masih rendah;
4. Masih minimnya kapasitas aparatur yang ada;
5. Perlu pendidikan atau diklat terhadap staf yang menangani kepegawaian;
6. Perlunya bangunan dan peralatan kantor yang memadai seperti gedung kantor, komputer, laptop, printer, meja, kursi, dan lain-lain;

20. Urusan Ketahanan Pangan

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan adalah:

1. Pengetahuan petani tentang teknologi pertanian masih rendah;
2. Usahatani yang dilakukan oleh petani masih bersifat sub sistem;
3. Permodalan yang dimiliki petani sangat terbatas dan masih menggantungkan bantuan dari Dinas;
4. Terbatasnya pelatihan-pelatihan teknis baik bagi petugas maupun petani;
5. Kelembagaan petani yang terbentuk belum berjalan secara efektif;
6. Sebagian besar bahan pangan kecuali umbi-umbian masih didatangkan dari luar daerah Kepulauan Talaud;
7. Disparitas harga pangan antara kota dan pedesaan cukup tinggi;
8. Ketersediaan dan dukungan anggaran bidang penyuluhan pertanian sangat terbatas;
9. Sarana dan prasarana/perengkapan kerja belum memadai.

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah:

1. Tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat masih terbatas;
2. Belum optimalnya penguatan kelembagaan masyarakat.

22. Urusan Statistik

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang statistik adalah:

1. Data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud yang sering berbeda dengan data kependudukan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. Belum optimalnya penyusunan data base pada beberapa instansi.

23. Urusan Kearsipan

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang kearsipan adalah:

1. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya penanganan dan penyimpanan arsip;
2. Belum adanya tempat penyimpanan arsip yang memadai;
3. Penanganan arsip belum optimal;
4. Belum adanya sarana penunjang yang memadai.

24. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika adalah:

1. Kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang tersedia masih rendah baik itu pengetahuan teknologi informasi serta belum sesuai kualifikasi;
2. Peralatan dan perlengkapan teknologi dalam pengembangan teknologi informasi belum sesuai kualifikasi;
3. Pelayanan data dan informasi berbasis system untuk kepentingan kebijakan/ keputusan pimpinan/atasan maupun konsumsi masyarakat belum optimal dan belum tepat waktu;
4. Pengelolaan data dan informasi belum menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang akurat dan handal.

25. Urusan Pertanian

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang pertanian adalah:

1. Produksi dan produktivitas komoditi pertanian sangat lamban peningkatannya;
2. Rendahnya penyediaan lahan potensi disebabkan kemampuan membuka lahan oleh petani rendah;
3. Keterbatasan infrastruktur dan sarana produksi pertanian;
4. Kualitas sumberdaya manusia petani dan kelompok tani melalui kuantitas dan kualitas penyuluh masih rendah;
5. Rendahnya mutu hasil pertanian dari produk primer menjadi produk sekunder;

6. Kualitas data dan informasi pertanian dalam menunjang pembangunan pertanian masih rendah;
7. Konsultasi, supervisi dan pembinaan kegiatan di lokasi masih rendah terutama lokasi-lokasi yang jauh dari ibukota Kabupaten;
8. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia petani dan kelompok tani selaku pelaku pembangunan pertanian;
9. Adanya serangan hama penyakit;
10. Sulitnya akses informasi;
11. Kurang berfungsinya kelompok tani.

26. Urusan Kehutanan

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang kehutanan adalah:

1. Kebutuhan pemanfaatan hutan dan penambahan penduduk cenderung meningkat;
2. Meningkatnya luas lahan kritis;
3. Masih terdapat kegiatan illegal hasil hutan;
4. Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) sebagai unit pengelola belum dilaksanakan;
5. Fasilitas pendamping (SDM, pendanaan, keterampilan) di masyarakat belum terfasilitasi dengan baik;
6. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menjangkau kawasan hutan yang jauh dari ibukota Kabupaten;
7. Kapasitas kelembagaan masyarakat dan aparatur kehutanan masih rendah;
8. Data dan informasi tentang keberadaan masyarakat di sekitar hutan belum tersedia secara baik dan lengkap;
9. Tingkat pelayanan usaha di bidang kehutanan masih rendah;
10. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan kehutanan;
11. Potensi hutan belum terdata secara akurat dan lengkap;
12. Pemanfaatan hasil hutan belum memperhatikan keseimbangan ekonomi sosial dan lingkungan;
13. Koordinasi lintas instansi teknis kehutanan belum optimal.

27. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral adalah:

1. Terbatasnya infrastruktur;
2. Letak geografis;
3. Belum adanya sinkronisasi antara kewenangan Pusat, Provinsi dan Daerah Kabupaten;
4. Terbatasnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur;
5. Terbatasnya dana;
6. Belum tersedianya data yang akurat.

28. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan adalah:

1. Aspek Penangkapan : akibat eksploitasi penangkapan yang terus meningkat mengakibatkan persaingan dalam penggunaan alat tangkap sehingga dikhawatirkan akan menggunakan alat tangkap yang dapat merusak sumber daya perikanan;
2. Aspek Budidaya: pada daerah potensial untuk kegiatan akuakultur sehingga dilestarikan akan terjadi kerusakan ekosistem yang akan berdampak pada kegiatan budidaya. Selain itu dengan semakin terbukanya daerah ini akan memungkinkan produk-produk dari luar yang mengganggu kegiatan budidaya serta masuknya hama penyakit yang menjadi masalah yang sulit diberantas.
3. Aspek pengawasan dan Perlindungan: dengan wilayah perairan yang luas dan dengan terbatasnya kemampuan serta sarana dan prasarana mengakibatkan kegiatan pencurian ikan dan pengrusakan lingkungan oleh nelayan lokal, terutama nelayan Filipina mungkin juga akan terjadi dan berlanjut;
4. Konservasi sumberdaya Perikanan: keterbatasan kemampuan dan keterampilan nelayan mengakibatkan kecenderungan menggunakan metode penangkapan yang dapat merusak lingkungan seperti penggunaan

- alat tangkap yang tidak sesuai atau menggunakan bahan beracun dan bahan peledak;
5. Terbatasnya anggaran Belanja Daerah sebagai penunjang pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan;
 6. Kegiatan penangkapan masih bersikap tradisional, karena kemampuan dan keterampilan masyarakat nelayan terbatas, peralatan penangkapan tidak memadai;
 7. Terbatasnya modal usaha untuk pengembangan usaha perikanan bagi masyarakat nelayan;
 8. Masih terbatasnya sumber daya manusia sebagai pendukung perencanaan kegiatan pembangunan di bidang Kelautan dan perikanan;
 9. Faktor geografis antar pulau yang jauh dari Pusat kota menjadi kendala dalam pengelolaan dan penangkapan hasil tangkapan;
 10. Faktor pasar yang kurang mendukung bagi pemasaran hasil penangkapan;
 11. Terbatasnya regulasi dan pengawasan dalam peredaran hasil tangkapan, pencemaran laut, dan kerusakan terumbu karang akibat penggunaan bahan peledak dan racun.

29. Urusan Perdagangan

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang perdagangan adalah:

1. Distribusi barang dan jasa masih terbatas;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pasar;
3. Tata aturan sistem perdagangan masih bersifat sentralisasi;
4. Terbatasnya dana APBD untuk membangun infrastruktur pasar;
5. Terbatasnya SDM yang terampil dalam bidang perdagangan.

30. Urusan Industri

Permasalahan Pembangunan daerah yang dihadapi pada urusan pemerintahan bidang industri adalah:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan manajemen mutu produksi;
2. Teknologi yang digunakan cenderung teknologi sederhana dan tradisional;

3. Para pengusaha/pengrajin masih pasif dalam permasalahan produksinya dan kurang memanfaatkan kesempatan promosi;
4. Pesaing yang semakin ketat antara pelaku dunia usaha termasuk industri kecil/menengah;
5. Terbatasnya dukungan dana terhadap kegiatan penelitian.

IV.2. Isu strategis

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan organisasi/institusi dimasa yang akan datang. Isu strategis diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk analisis kebijakan terhadap entitas pemerintahan di atasnya. Hal ini bertujuan agar rumusan isu strategis yang dihasilkan dapat sinkron dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan kebijakan pembangunan jangka menengah provinsi bagi kabupaten. Sinkronisasi langkah dan kebijakan pembangunan daerah terhadap isu-isu strategis tetap berlandaskan bahwa pembangunan daerah tidak saja memanfaatkan peluang dimasa datang, tak kalah penting, perencanaan daerah juga harus menghasilkan ide dan langkah untuk menciptakan peluang itu sendiri.

Dengan demikian, Isu strategis Kabupaten Kepulauan Talaud untuk tahun 2014-2019 memiliki kriteria, sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan pembangunan daerah; dan
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani.

IV.2.1. Landasan dasar

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2019 diperlukan identifikasi terhadap isu-isu strategis yang saat ini berkembang maupun isu-isu yang kemungkinan besar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, akan tetap mewarnai dinamika perkembangan Kabupaten Kepulauan Talaud. Hal ini untuk memberikan perhatian dan prioritas terhadap arahan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan bagi Kabupaten Kepulauan Talaud.

Analisis terhadap isu-isu strategis ini dilandaskan pada beberapa faktor yang akan mempengaruhi perkembangan Kabupaten Kepulauan Talaud ke depan. Faktor-faktor tersebut antara lain :

- a. Gambaran umum kondisi Kabupaten Kepulauan Talaud saat ini (eksisting) sebagaimana ditampilkan dalam BAB II Lampiran Peraturan Daerah ini. Gambaran Umum ini tidak terlepas dari kondisi masalah dan potensi yang berkembang secara nyata di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- b. Permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana telah diuraikan pada Bagian awal BAB IV ini;
- c. Arahan dan tahapan untuk RPJMN Ketiga Tahun 2015-2019 sebagaimana termuat dalam RPJP Nasional Tahun 2005-2025 yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan iptek;
- d. 9 (Sembilan) Prioritas Pembangunan Nasional yang merupakan agenda prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014-2019, yakni :
 1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
 4. Melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik;
 8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
 9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
- e. Arahan dan tahapan untuk RPJMD ketiga Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2019 sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Provinsi Sulawesi Utara tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025 yakni memantapkan pembangunan Sulawesi Utara yang berbudaya, berdaya saing, aman, dan sejahtera, dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan iptek;
- f. 13 (tiga belas) Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2015, yaitu :
1. Reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pembangunan tanpa korupsi;
 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan;
 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan;
 4. Pencapaian MDG's dan penurunan angka kemiskinan serta pengangguran;
 5. Peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis;
 6. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur (sosial, ekonomi, dan budaya) sesuai tata ruang;
 7. Peningkatan iklim investasi dan pengembangan ekonomi local;
 8. Pengembangan industri kreatif;
 9. Pengembangan koridor ekonomi: Kawasan Strategis Nasional (KAPET, KEK), Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (Agropolitan, Minapolitan, Kawasan Sentra Produksi), Kawasan andalan (Bunaken);
 10. Pembangunan dan pengembangan sumber energy baru dan terbarukan sesuai tata ruang;
 11. Antisipasi dampak perubahan iklim dan bencana alam (mitigasi dan adaptasi), pelestarian hutan, dan konservasi lingkungan hidup;
 12. Pembangunan kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan dan terpencil;

13. Peningkatan pariwisata (*marine tourism industry and community based ecotourism*) dan pelestarian nilai-nilai budaya.
- g. Penyampaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai dokumen pembangunan, dalam menganalisis isu-isu strategis;
 - h. Pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, pencapaian MDG's, pemantapan ketahanan pangan dan pertahanan keamanan, peningkatan dan pengembangan usaha kecil-menengah, adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana, pengembangan dan pemanfaatan pulau-pulau terluar NKRI, serta pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya lokal merupakan 8 (delapan) prioritas penanganan pembangunan yang telah dicanangkan sejak RPJMD I Kabupaten Kepulauan Talaud (RENSTRA Tahun 2005-2009) dan RPJMD II Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2009-2014, namun beberapa peningkatan kinerja masih harus terus dilakukan pada periode RPJMD III Tahun 2014-2019 agar terdapat kesinambungan pembangunan;
 - i. Dalam penyusunan isu-isu strategis Kabupaten Kepulauan Talaud memperhatikan isu-isu strategis tingkat Pusat dan tingkat Provinsi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan Kabupaten Kepulauan Talaud.

IV.2.2. Analisa SWOT

Analisa SWOT merupakan *instrument* yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis beberapa faktor secara sistematis untuk merumuskan isu-isu strategis di dalam mengelola penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Berikut ini adalah hasil identifikasi SWOT.

A. Kekuatan

1. Nilai budaya dan karakter penduduk yang religius;
2. Suasana keamanan yang kondusif;
3. Tuntutan yang tinggi dari masyarakat atas kualitas pelayanan dan reformasi birokrasi;

4. Sifat kritis dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
5. Kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif;
6. Komitmen pimpinan daerah pada lingkungan hidup, penyediaan sarana dan prasarana publik, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
7. Koordinasi yang baik di tingkat unsur pimpinan daerah (Muspida);
8. Suasana politik yang damai dan kedewasaan demokrasi masyarakat;
9. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
10. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan laut dan udara yang dapat meningkatkan mobilisasi orang dan barang, khususnya peningkatan aspek perdagangan.
11. Ketersediaan lahan untuk peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud;
12. Potensi penduduk produktif dan terdidik;

B. Kelemahan

1. Keterbatasan pembiayaan pembangunan yang berasal dari PAD;
2. Belum terbangunnya jalan dan jembatan pada beberapa ruas jalan nasional, ruas jalan provinsi dan ruas jalan kabupaten;
3. Belum maksimalnya penyediaan sarana dan prasarana air bersih/minum bagi masyarakat;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana jaringan irigasi untuk ketahanan pangan daerah;
5. Keterbatasan tenaga pendidikan dan tenaga medis, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
6. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan komoditas unggulan daerah di bidang kelautan-perikanan dan pertanian;
7. Pengendalian lingkungan;
8. Etos kerja aparatur;
9. Konsistensi dan ketegasan dalam penegakan hukum/aturan;
10. Ketidaktersediaan infrastruktur Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;

11. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah;
12. Ketidaktersediaan Tempat Pemakaman Umum;

C. Peluang

1. Posisi strategis Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai daerah perbatasan atau beranda depan NKRI yaitu berbatasan dengan Negara Filipina;
2. Potensi sumber daya alam di bidang kelautan-perikanan dan pertanian;
3. Kota Melonguane sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
4. Kerjasama antar daerah;
5. Pendanaan pusat melalui program-program yang selaras dengan program Kabupaten Kepulauan Talaud;

D. Ancaman

1. Bencana alam dan degradasi lingkungan;
2. Perubahan iklim dan pemanasan global;
3. Meningkatnya jumlah penduduk miskin;
4. Tingginya peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di masyarakat yang dapat menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas dan menurunnya motivasi kerja;
5. Terjadinya *illegal fishing* dan *illegal trade*.

IV.2.3. Isu-Isu Strategis Kabupaten Kepulauan Talaud

Berdasarkan hasil identifikasi tim perumus yang dipayungi oleh pemahaman di atas dan permasalahan pembangunan yang dihadapi, maka isu strategis Kabupaten Kepulauan Talaud untuk periode 2014-2019 adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan profesionalisme aparatur dan peningkatan pelayanan publik;
2. Penyediaan dan peningkatan infrastruktur publik;
3. Peningkatan dan perluasan pembangunan pendidikan yang berkualitas;
4. Peningkatan dan pemerataan kesehatan;
5. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemenuhan hak anak;

6. Percepatan pembangunan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan UMKM, pembangunan pariwisata, dan pengelolaan sumber daya alam unggulan daerah di bidang pertanian dan kelautan-perikanan;
7. Peningkatan konektivitas intra dan antar pulau, dan peningkatan pembangunan daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar NKRI;
8. Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang;
9. Penanggulangan kemiskinan;
10. Mitigasi bencana;
11. Peningkatan kualitas dan pencegahan degradasi lingkungan hidup serta ketahanan perubahan iklim;
12. Peningkatan pelayanan persampahan;
13. Penataan tempat pemakaman umum (TPU).